

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka penyerahan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan, akuntabilitas dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Aparatur pemerintah berperan sebagai penggerak utama atas kelancaran kegiatan organisasi pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah perlu mengelola perangkat pemerintahan yang ada secara optimal agar tercipta kinerja yang baik. Kinerja aparatur pemerintahan yang baik dapat diukur berdasarkan hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan tersebut. Kinerja aparatur pemerintahan yang baik akan membuat kinerja suatu organisasi pemerintah menjadi semakin baik.

Dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah sebagai sumber daya manusia dalam organisasi pemerintah mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik, maupun non fisik. Hal ini dilandasi suatu kenyataan bahwa aparatur pemerintah merupakan tulang punggung Negara, sehingga tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 banyak ditentukan oleh pelaksanaan tugas yang dibebankan pada aparatur pemerintah.

Perkembangan dalam teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas, jarak, tempat, ruang dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency*, *fairness*, *responsibility* dan *accountability*. Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini

dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SKPD terdiri dari beberapa dinas dan badan serta instansi lainnya yang memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam pelaksanaan kegiatan, SKPD Provinsi tidak lepas dari peran aparatur pemerintah daerah yang ada di dalamnya.

Fenomena yang mendukung penelitian ini dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi sorotan seperti serapan anggaran oleh pihak SKPD yang kurang dari 50% di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ada beberapa kegiatan yang belum layak dilaksanakan. Kecilnya serapan daerah karena ketidakmampuan pimpinan SKPD di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya tingkat kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sehingga menyebabkan sering terjadi permasalahan dalam anggarannya. Selain itu belum semua pegawai dalam instansi tersebut menerapkan prinsip *good governance* sehingga tidak menjalankan tugas secara optimal dan efisien. Kinerja aparatur memiliki peran yang penting bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pegawai dan organisasi pemerintah, yang lebih menekankan pada aspek transparansi, akuntabel, serta kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang ekonomis,

efektif dan efisien. Apabila aparatur pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, maka informasi keuangan akan dihasilkan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya salah satu masalah yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintahan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Belum semua aparatur pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sehingga pelayanan yang diberikan organisasi jasa, lambat dan kurang akurat. Teknologi informasi seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan perlu ditingkatkan sehingga semakin terbuka dan tersebar informasi dan pengetahuan untuk menghasilkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan pada SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja Aparatur Pemerintahan di SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap kinerja Aparatur Pemerintahan di SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Batasan Penelitian

Agar ruang lingkup pembahasannya menjadi terarah dan terfokus sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah yang akan membatasi ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu ruang lingkup penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai objek penelitian, sedangkan pokok yang dibahas yaitu terkait pemanfaatan teknologi informasi dan *good governance* terhadap kinerja aparatur pemerintahan pada SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah tersebut, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja Aparatur Pemerintahan di SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kinerja Aparatur Pemerintahan di SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Untuk bidang Akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi, akuntansi pemerintahan di Indonesia, sebagai referensi dalam pengukuran kinerja aparatur pemerintahan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul, rumusan masalah yang akan

dibahas, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan mengurai tentang penelitian jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas deskripsi data dari hasil penelitian yang diperoleh dan analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan mengusulkan saran-saran serta keterbatasan penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya.